

PERAN DAN RELASI KUASA AKTOR PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN NON-PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM JAKLINGKO TAHUN 2021-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan relasi kuasa aktor pemerintah provinsi DKI Jakarta dan non-pemerintah dalam implementasi kebijakan sistem JakLingko pada tahun 2021-2023. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel *context of implementation* dari Marilee S Grindle. Variabel ini peneliti gunakan untuk menganalisis keberhasilan peran aktor pemerintah provinsi DKI Jakarta dan non-pemerintah. Peneliti juga menggunakan konsep pemetaan *stakeholder* berdasarkan *power* dan *interest* dari Rachel Thompson untuk memetakan kelompok aktor berdasarkan *power* dan *interest* melalui analisis peran aktor. Terakhir adalah konsep relasi kuasa dari Michael Foucault yang peneliti gunakan untuk menganalisis akibat relasi kuasa terhadap implementasi kebijakan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor pemerintah dan non-pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan dasar hukum kebijakan sistem JakLingko yaitu Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020. Aktor pemerintah dan non-pemerintah cenderung patuh menjalankan perannya karena dipengaruhi oleh *power* dan *interest*. Adapun relasi kuasa antar aktor terjalin secara otomatis karena adanya pembagian peran. Relasi kuasa ini menjadikan aktor memiliki kepatuhan terhadap aktor lain yang berdampak pada implementasi peran aktor pada kegiatan implementasi kebijakan sistem JakLingko. Hal ini mengakibatkan adanya aktor yang terdampak akibat peran dan relasi kuasa, sehingga perannya dalam implementasi kebijakan sistem JakLingko merugikan aktor tersebut serta masyarakat sebagai pengguna transportasi umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka.

Kata Kunci : Peran, Relasi Kuasa, Implementasi Kebijakan Publik, Aktor, Sistem JakLingko.

**THE ROLE DAN POWER RELATIONSHIP OF DKI JAKARTA
PROVINCE GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT ACTORS IN
THE IMPLEMENTATION OF JAKLINGKO SYSTEM POLICIES IN
2021-2023**

ANDREW VALENTINO

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and power relations of DKI Jakarta provincial government and non-government actors in the implementation of the JakLingko system policy in 2021-2023. The theory and concept used in this study is the context of implementation variable from Marilee S Grindle. The researcher uses this variable to analyze the success of the role of DKI Jakarta provincial government and non-government actors. The researcher also uses the concept of stakeholder mapping based on power and interest from Rachel Thompson to map actor groups based on power and interest through actor role analysis. Finally, the concept of power relations from Michael Foucault which the researcher uses to analyze the effects of power relations on policy implementation. The results of the study show that government and non-government actors have carried out their roles in accordance with the legal basis for the JakLingko system policy, namely Governor Regulation Number 68 of 2021 and Governor Regulation Number 63 of 2020. Government and non-government actors tend to obey their roles because they are influenced by power and interest. The power relations between actors are automatically established because of the division of roles. This power relationship makes actors obey other actors which has an impact on the implementation of the actor's role in the implementation of the JakLingko system policy. This results in actors being affected by their roles and power relations, so that their role in the implementation of the JakLingko system policy is detrimental to these actors and the community as users of public transportation. This study uses a qualitative approach. This type of research is descriptive research, using primary data sources through interviews and secondary data through literature studies.

Keywords : Role, Power Relationship, Public Policy Implementation, Actor, JakLingko System